

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum yang dipergunakan didalam penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Belitung Akhir Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 49).

1.2 Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Secara geografis, Kabupaten Belitung terletak antara 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 (dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh sembilan) ha atau kurang lebih 2.293,69 km² yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu a) Kecamatan Membalong dengan luas wilayah 909,55 km²; b) Kecamatan Tanjungpandan dengan luas wilayah 378,45 km²; c) Kecamatan Badau dengan luas wilayah 458,20 km²; d) Kecamatan Sijuk dengan luas wilayah 413,99 km²;

dan e) Kecamatan Selat Nasik dengan luas wilayah 133,50 km². Pada peta dunia Pulau Belitung dikenal dengan nama “Billitonit” yang bergaris tengah Timur-Barat ± 79 (tujuh puluh sembilan) km dan garis tengah Utara-Selatan ± 77 (tujuh puluh tujuh) km. Dengan batas wilayah meliputi a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan; b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur; c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa; dan d) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar. Kabupaten Belitung mempunyai iklim tropis dan basah dengan variasi curah hujan bulanan pada tahun 2014 antara 25,0 mm sampai 523,0 mm dengan jumlah hari hujan antara 3 (tiga) hari sampai 22 (dua puluh dua) hari setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada tahun 2014 terjadi pada Bulan Mei yang mencapai 523,0 mm. Rata-rata temperatur udara pada tahun 2014 bervariasi antara 25,7 °C sampai 27,6 °C, dimana kelembaban udaranya bervariasi antara 74,00 % sampai 90,00 %, dan tekanan udara antara 1.009,5 mb sampai dengan 1.011,9 mb. Daerah yang paling tinggi di Kabupaten Belitung hanya mempunyai ketinggian kurang lebih 500 (lima ratus) m dari atas permukaan laut dengan puncak tertinggi ada di daerah Gunung Tajam. Sedangkan untuk daerah hilir (pantai) terdiri atas beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yakni :

- a. Sebelah Utara oleh DAS Buding;
- b. Sebelah Selatan oleh DAS Pala dan Kembiri; dan
- c. Sebelah Barat oleh DAS Brang dan Cerucuk.

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang juga merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 100 (seratus) buah pulau besar dan kecil. Pulau yang terbesar adalah Pulau Belitung, disamping itu masih ada pulau besar lainnya seperti Pulau Seliu, Pulau Mendanau, dan Pulau Nadu. Penyebaran pulau di setiap kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penyebaran Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung

No	Kecamatan	Jumlah Pulau
(1)	(2)	(3)
1.	Membalong	36
2.	Tanjungpandan	5
3.	Sijuk	25
4.	Badau	8
5.	Selat Nasik	26
	Jumlah	100

Sumber data : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, Tahun 2017

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kwarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kwarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan dengan luas mencapai 266.865 (dua ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam puluh lima) ha atau 56,98 % dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 km² atau 5,82 % dari luas Kabupaten Belitung. Kondisi topografi di daerah pedalaman Pulau Belitung pada umumnya bergelombang dan berbukit-bukit yang kemudian membentuk pola aliran sungai di daerah ini menjadi pola sentrifugal, dimana sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai.

Sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Data Penduduk Menurut Kecamatan

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2016 berjumlah 156.892 (seratus lima puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh dua) jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 68,40 jiwa/km², sebagaimana tergambar pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
dalam Kabupaten Belitung Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan (Desa/Kelurahan)	Luas (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Membalong	12	909,550	23.537	25,88
2.	Tanjungpandan	16	378,448	86.539	228,67
3.	Badau	7	458,200	13.144	28,69
4.	Sijuk	10	413,992	27.805	67,16
5.	Selat Nasik	4	133,500	5.867	43,95
	Jumlah	49	2.293,690	156.892	68,40

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2017

Dilihat dari sebarannya maka jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanjungpandan sebesar 86.539 (delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh sembilan) jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 228,67 jiwa/km².

b. Data Penduduk Menurut Pendidikan

Pada tahun 2016, jumlah lulusan D IV/S1, S2 dan S3 mencapai 3.928 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan) orang, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Penduduk Menurut Pendidikan Tahun 2016

No	Pendidikan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tidak/Belum Sekolah	15.507	15.025	30.532
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	12.108	11.830	23.938
3.	Tamat SD/Sederajat	20.401	21.332	41.733
4.	SLTP/Sederajat	11.795	11.063	22.858
5.	SLTA/Sederajat	16.260	14.127	30.387
6.	Diploma I/II	458	726	1.184
7.	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	1.120	1.212	2.332
8.	Diploma IV/Strata I	1.976	1.844	3.820

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Strata II	78	29	107
10.	Strata III	1	0	1
	Jumlah	79.704	77.188	156.892

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2017

c. Data Penduduk Menurut Agama

Mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah 144.079 (seratus empat puluh empat ribu tujuh puluh Sembilan) orang, sedangkan penduduk yang lain beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghuchu. Gambaran jumlah pemeluk agama disajikan tabel berikut :

Tabel 1.4
Data Penduduk Menurut Agama Tahun 2016

No	Agama	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Islam	73.236	70.843	144.079
2.	Kristen	1.175	1.216	2.391
3.	Katholik	538	520	1.058
4.	Hindu	399	340	739
5.	Budha	4.329	4.244	8.573
6.	Konghuchu	27	25	52
	Jumlah	79.704	77.188	156.892

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2017

d. Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Data penduduk menurut pekerjaan disajikan tabel berikut :

Tabel 1.5
Data Penduduk Menurut Pekerjaan Tahun 2016

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Belum/Tidak Bekerja	18.095	16.714	34.809
2.	Mengurus Rumah Tangga	12	40.722	40.734
3.	Pelajar/Mahasiswa	13.079	12.302	25.381
4.	Pensiunan	750	196	946
5.	Pegawai Negeri Sipil	2.234	2.051	4.285
6.	Tentara Nasional Indonesia	153	1	154
7.	Kepolisian RI	290	13	303
8.	Perdagangan	698	185	883

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Petani/Pekebun	5.408	256	5.664
10.	Peternak	23	3	26
11.	Nelayan/Perikanan	6.131	20	6.151
12.	Industri	47	5	52
13.	Konstruksi	57	2	59
14.	Transportasi	65	0	65
15.	Karyawan Swasta	6.370	2.195	8.565
16.	Karyawan BUMN	227	62	289
17.	Karyawan BUMD	29	19	48
18.	Karyawan Honorer	496	520	1.016
19.	Buruh Harian Lepas	16.427	546	16.973
20.	Buruh Tani/Perkebunan	127	32	159
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	216	2	218
22.	Buruh Peternakan	5	2	7
23.	Pembantu Rumah Tangga	3	38	41
24.	Tukang Cukur	3	0	3
25.	Tukang Listrik	16	0	16
26.	Tukang Batu	10	0	10
27.	Tukang Kayu	48	0	48
28.	Tukang Sol Sepatu	3	0	3
29.	Tukang Las/Pandai Besi	26	0	26
30.	Tukang Jahit	19	15	34
31.	Penata Rias	4	5	9
32.	Penata Rambut	5	7	12
33.	Mekanik	91	0	91
34.	Seniman	14	1	15
35.	Tabib	2	0	2
36.	Paraji	0	1	1
37.	Imam Mesjid	5	0	5
38.	Pendeta	13	1	14
39.	Pastor	2	0	2
40.	Wartawan	28	0	28
41.	Ustadz/Mubaligh	4	0	4
42.	Juru Masak	1	7	8
43.	Anggota DPD	1	0	1
44.	Gubernur	1	0	1
45.	Bupati	1	0	1
46.	Anggota DPRD Provinsi	1	0	1
47.	Anggota DPRD Kabupaten/Kota	24	0	24
48.	Dosen	12	6	18
49.	Guru	109	235	344

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
50.	Pilot	2	0	2
51.	Pengacara	5	1	6
52.	Notaris	0	2	2
53.	Arsitek	4	0	4
54.	Akuntan	1	1	2
55.	Konsultan	10	1	11
56.	Dokter	17	15	32
57.	Bidan	0	32	32
58.	Perawat	13	27	40
59.	Apoteker	0	7	7
60.	Penyiar Radio	0	2	2
61.	Pelaut	163	0	163
62.	Peneliti	2	0	2
63.	Sopir	342	0	342
64.	Pedagang	368	93	461
65.	Perangkat Desa	74	47	121
66.	Kepala Desa	15	2	17
67.	Biarawati	0	11	11
68.	Wiraswasta	7.301	783	8.084
69.	Lainnya	2	0	2
	Jumlah	79.704	77.188	156.892

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2017

e. Data Penduduk Menurut Struktur Umur

Berdasarkan data yang ada, jumlah penduduk usia produktif (usia 15 - 64 tahun) sebanyak 109.611 (seratus Sembilan ribu enam ratus sebelas) orang dan jumlah penduduk tidak produktif (usia < 15 tahun dan usia > 64 tahun) sebanyak 47.281 (empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh satu) orang. Berikut ini tabel sebaran penduduk berdasarkan struktur umur :

Tabel 1.6
Data Penduduk Menurut Struktur Umur Tahun 2016

No	Struktur Umur	Laki-Laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah (jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	0 - 4	6.374	6.007	12.381
2.	5 - 9	6.906	6.511	13.417
3.	10 - 14	6.993	6.722	13.715
4.	15 - 19	5.865	5.987	11.852
5.	20 - 24	6.621	6.235	12.856
6.	25 - 29	6.435	6.278	12.713
7.	30 - 34	7.044	6.751	13.795

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	35 - 39	7.012	6.795	13.807
9.	40 - 44	6.338	6.102	12.440
10.	45 - 49	5.250	5.056	10.306
11.	50 - 54	4.628	4.432	9.060
12.	55 - 59	3.691	3.532	7.223
13.	60 - 64	2.794	2.765	5.559
14.	65 - 69	1.730	1.846	3.576
15.	70 - 74	1.083	1.159	2.242
16.	> = 75	940	1.010	1.950
	Jumlah	79.704	77.188	156.892

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, Tahun 2017

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Sekilas gambaran ringkas mengenai potensi unggulan yang dimiliki daerah yang memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah, yaitu :

1. Pertambangan

Potensi sumberdaya alam yang ikut berkontribusi bagi perekonomian Kabupaten Belitung adalah sumberdaya alam pertambangan khususnya bahan galian golongan C. Daerah memiliki deposit yang cukup tinggi akan bahan galian ini. Akan tetapi, mengingat eksploitasi sumberdaya ini memiliki pengaruh khusus terhadap kualitas lingkungan maka daerah berupaya untuk menurunkan tingkat ketergantungannya terhadap sektor ini.

2. Kelautan dan Perikanan

Sebagai wilayah kepulauan tentunya Kabupaten Belitung memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup tinggi selain sektor pertambangan di atas, dan tidak salah jika dikatakan bahwa Kabupaten Belitung merupakan salah satu penghasil sektor kelautan dan perikanan. Bertolak dari hal tersebut maka daerah berupaya keras terhadap pengembangan sektor ini melalui pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

3. Pariwisata

Selain mengandung potensi kelautan dan perikanan, sumberdaya alam perairan laut di Kabupaten Belitung juga sangat potensial untuk pengembangan industri pariwisata. Perairan laut Pulau Belitung kaya akan terumbu karang yang indah sehingga cukup berpotensi untuk dijadikan objek wisata bawah air, selain wisata pantai yang memang cukup banyak yang bisa dikembangkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas Kabupaten Belitung, baik dalam upaya peningkatan perekonomian daerah, pendapatan asli daerah maupun pendapatan masyarakat. Pengembangan usaha pariwisata juga meliputi usaha penginapan berupa hotel, losmen dan usaha restoran.

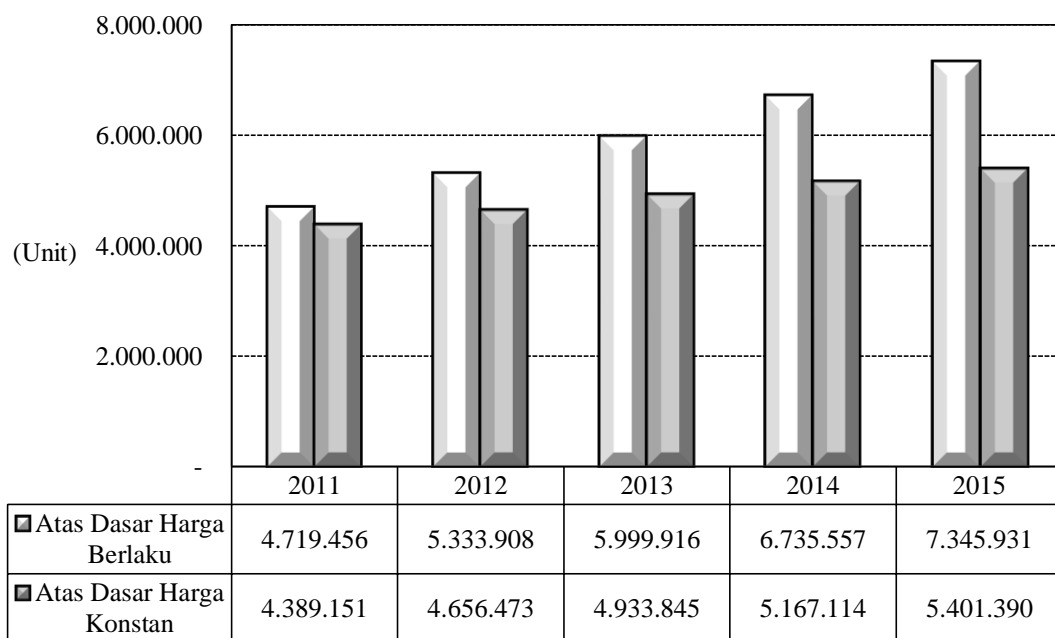
b. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk domestik regional bruto adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri dari 1) PDRB atas dasar harga berlaku; dan 2) PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar, dalam hal ini tahun 2011 digunakan sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat dipergunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan besaran PDRB atas dasar harga konstan dipergunakan untuk menentukan laju pertumbuhan ekonomi. Selain sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, PDRB juga dapat dijadikan sebagai indikator yang memberikan gambaran mengenai kemampuan daerah terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki daerah. Besaran PDRB Kabupaten Belitung atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2011-2015 dijelaskan grafik berikut ini :

Gambar 1.1

PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015 (Juta Rupiah)

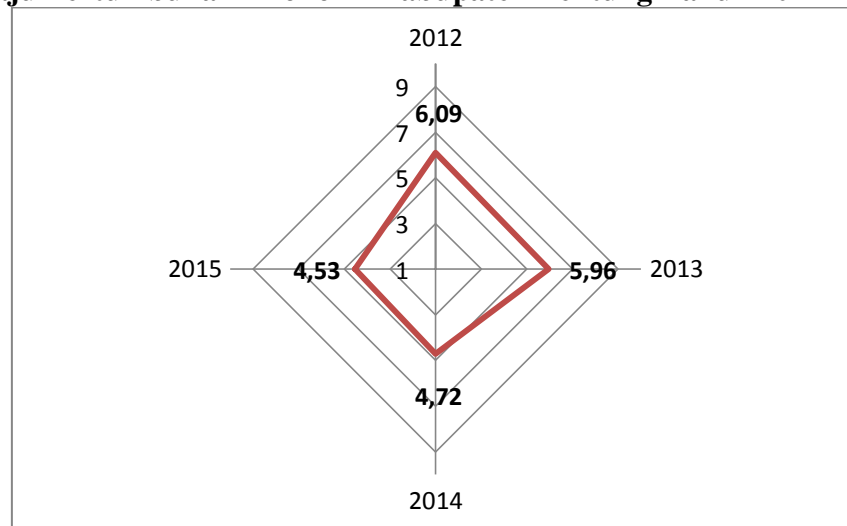


Setiap tahunnya, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan. Tahun 2015, PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp 7.345.931.000.000 mengalami peningkatan sebesar Rp 610.374.000.000 atau 9,06 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai sebesar Rp 6.735.557.000.000. Sedangkan bagi PDRB atas dasar harga konstan, tahun 2014 sebesar Rp 5.167.114.000.000 mengalami peningkatan Rp 234.276.000.000 atau 4,53 % sehingga menjadi sebesar Rp 5.401.390.000.000 pada tahun 2015.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah diperoleh dari laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan daerah tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi daerah memberikan gambaran ringkas akan perubahan-perubahan keadaan perekonomian suatu daerah baik berupa kemajuan atau kemunduran komponen-komponen struktur perekonomian daerah. Pertumbuhan yang positif memberikan gambaran bahwa perekonomian mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini gambaran laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung dalam kurun waktu 2012-2015 :

Gambar 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2012-2015



Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung mencapai 4,53 %, lebih rendah 0,19 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang pertumbuhannya mencapai 4,72 %. Pertumbuhan ekonomi yang sebesar 4,53 % tersebut di atas merupakan akumulasi dari pertumbuhan setiap kategori lapangan usaha PDRB kabupaten. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 8,29 %; dan diikuti oleh kategori Jasa keuangan dan asuransi sebesar 8,25 %; kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 8,16 %; kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 6,20 %; kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 5,93 %; kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 5,92 %; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,86 %; kategori transportasi dan pergudangan sebesar 5,62 %; real estat sebesar 5,53 %; kategori jasa pendidikan sebesar 5,17 %; kategori jasa lainnya sebesar 5,15 %; kategori jasa perusahaan sebesar 4,97 %; kategori informasi dan komunikasi sebesar 4,96 %; kategori konstruksi sebesar 4,53 %; kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,04 %; kategori pertambangan dan penggalian sebesar 0,91 % dan untuk laju pertumbuhan terkecil terjadi pada kategori industri pengolahan sebesar 0,65 %.

Selanjutnya, laju pertumbuhan masing-masing kategori lapangan usaha didalam PDRB atas dasar harga konstan dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2012-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 *)	Tahun 2015 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	6,50	6,16	7,21	6,20
B.	Pertambangan dan penggalan	0,96	0,60	1,57	0,91
C.	Industri pengolahan	4,83	6,50	1,08	0,65
D.	Pengadaan listrik dan gas	7,54	5,35	4,05	8,16
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	6,87	7,15	4,67	5,93
F.	Konstruksi	10,09	8,81	3,84	4,53
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6,03	4,76	4,29	4,04
H.	Transportasi dan pergudangan	7,34	6,67	5,45	5,62
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	6,38	8,01	6,65	5,92
J.	Informasi dan komunikasi	8,18	5,81	5,08	4,96
K.	Jasa keuangan dan asuransi	8,07	13,38	11,80	8,25
L.	Real estat	7,94	8,52	6,33	5,53
M, N.	Jasa perusahaan	7,15	4,92	6,36	4,97
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	5,22	5,45	5,65	8,29
P.	Jasa pendidikan	7,20	5,06	3,98	5,17
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9,75	9,41	4,08	5,86
R, S, T, U.	Jasa lainnya	7,29	2,69	2,72	5,15
	Produk Domestik Regional Bruto	6,09	5,96	4,72	4,53

*Keterangan : *) Angka sementara*
****) Angka sangat sementara*

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Belitung Menurut Lapangan Usaha 2012-2015, Tahun 2017

Secara umum, dalam kurun waktu 2012-2015 laju pertumbuhan ekonomi daerah mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2015

merupakan implikasi positif dari keberhasilan pelaksanaan dari sektor-sektor pembangunan daerah baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Pembangunan berbagai infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan fisik baik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sektor kesehatan dan pendidikan maupun kebutuhan lain masyarakat dalam rangka mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat antara lain berupa sarana dan prasarana kepelabuhan baik udara maupun laut, ketersediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai tentunya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata daerah juga memberikan pengaruh positif terhadap pergerakan roda perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun tidak dipungkiri bahwa terjadi perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan tahun 2014. Hal ini tentunya tidak terlepas dari pengaruh dari beberapa hal yang terjadi pada tahun 2015 yang diasumsikan sebagai pengaruh internal dan eksternal bagi laju pertumbuhan ekonomi daerah meliputi 1) fluktuasi nilai tukar dolar; 2) fluktuasi harga bahan bakar minyak; dan 3) tingginya inflasi.

Daerah kaitannya dengan laju pertumbuhan ekonomi, berkewajiban untuk terus mendorong laju pertumbuhan ekonomi hingga berada pada tingkatan terbaik, akan tetapi target pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus pula diikuti oleh perbaikan tingkatan pemerataan pertumbuhan kategori lapangan usaha PDRB sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan tersebut dan selanjutnya akan berpengaruh positif terhadap tingkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan percepatan laju pertumbuhan ekonomi tersebut, daerah mengupayakannya melalui implementasi kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada 1) penciptaan kondisi yang kondusif dan mampu mendorong laju pertumbuhan kategori lapangan usaha PDRB; 2) penggalan, pemanfaatan dan inovasi pengelolaan potensi ekonomi lokal daerah; 3) penarikan investasi dan penciptaan lapangan kerja; 4) peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan memadai; dan 5) pengentasan kemiskinan.

3. Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah.

Besaran kontribusi masing-masing kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku dijelaskan melalui tabel berikut ini :

Tabel 1.8
Distribusi Prosentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Belitung
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2011-2015

No	Lapangan Usaha	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014 *)	Tahun 2015 **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Pertanian, kehutanan dan perikanan	25,94	26,55	26,80	27,20	27,41
B.	Pertambangan dan penggalian	11,69	10,84	10,04	9,64	8,95
C.	Industri pengolahan	13,94	13,62	13,64	13,43	12,83
D.	Pengadaan listrik dan gas	0,11	0,10	0,09	0,12	0,13
E.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F.	Konstruksi	9,98	9,96	10,15	10,02	10,17
G.	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	11,25	11,17	10,63	10,66	10,68
H.	Transportasi dan pergudangan	5,67	5,86	6,17	6,24	6,56
I.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	3,02	3,06	3,17	3,22	3,26
J.	Informasi dan komunikasi	2,79	2,71	2,58	2,50	2,48
K.	Jasa keuangan dan asuransi	1,91	2,02	2,20	2,23	2,25
L.	Real estat	3,11	3,13	3,25	3,29	3,30
M, N.	Jasa perusahaan	0,35	0,35	0,34	0,34	0,34
O.	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	6,09	6,50	6,76	6,93	7,30
P.	Jasa pendidikan	1,70	1,69	1,71	1,71	1,81
Q.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	1,67	1,66	1,71	1,70	1,72
R, S, T, U.	Jasa lainnya	0,75	0,75	0,74	0,75	0,77
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Keterangan : *) Angka sementara*
****) Angka sangat sementara*

Sumber data : Produk Domestik Regional Bruto Belitung Menurut Lapangan Usaha 2011-2015, Tahun 2017

Mengacu kepada data tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2015, urutan pertama dimiliki oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dengan nilai kontribusi sebesar 27,41 %. Hal ini tentunya memberikan penjelasan bahwa pergerakan roda perekonomian daerah didominasi oleh pergerakan lapangan usaha ini. Tingginya besaran prosentase kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB kabupaten diakibatkan oleh karena sebagian besar mata pencaharian dan aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari masih sangat bergantung kepada keberadaan lapangan usaha ini yang merupakan alternatif lapangan usaha bagi masyarakat. 1) Ketersediaan lahan pertanian dan kondisi iklim yang mendukung; 2) daerah kepulauan; 3) keterbatasan modal dan tingkat pengetahuan masyarakat; 4) keterbatasan ketersediaan lapangan kerja dan alternatif lapangan usaha lainnya; dan 5) tingginya daya saing dan tuntutan pemahaman serta penguasaan teknologi dan pengetahuan bagi berbagai alternatif lapangan usaha lainnya, kelima faktor ini diidentifikasi sebagai faktor yang mendorong tingkat ketergantungan masyarakat terhadap lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 7,21 % pada tahun 2014 dan pada tahun 2015 laju pertumbuhannya berubah menjadi sebesar 6,20 % sehingga terlihat terjadi penurunan laju pertumbuhan diantara kedua tahun tersebut. Optimalisasi terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan oleh pemerintah daerah tentunya dengan dukungan masyarakat secara luas khususnya pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan seperti intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengelolaan potensi pertanian, kehutanan dan perikanan daerah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan akan mampu mendorong laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut ditahun-tahun berikutnya.

Urutan kedua dimiliki oleh kategori lapangan usaha industri pengolahan dengan nilai sebesar 12,83 %. Hal ini juga merupakan indikator yang menunjukkan bahwa keberadaan industri-industri pengolahan yang meliputi 1) industri makanan dan minuman; 2) industri tekstil dan pakaian jadi; 3) industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya; 4) industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan reproduksi media rekaman; 5) industri kimia, farmasi dan obat tradisional; 6) industri barang galian bukan logam; 7) industri logam dasar; 8) industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; 9) industri alat angkutan; 10) industri furnitur; dan 11) industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, dijadikan sebagian besar masyarakat sebagai alternatif lapangan pekerjaan dan sentral aktivitas perekonomian didalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan pada tahun 2014 mencapai 1,08 % dan pada tahun 2015 laju pertumbuhannya menjadi sebesar 0,65 %. Dukungan terhadap fasilitasi, penguatan modal, sumberdaya manusia, kelembagaan, pemberdayaan dan pengembangan bagi industri kecil dan menengah dalam artian luas serta penarikan investor yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan.

Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menduduki urutan ketiga dengan nilai kontribusi sebesar 10,68 %. Pada tahun 2014, laju pertumbuhan lapangan usaha ini mencapai 4,29 % dan selanjutnya pada tahun 2015 menjadi sebesar 4,04 %. Laju pertumbuhan penduduk dan perbaikan kemampuan daya beli masyarakat diidentifikasi sebagai faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkatan kontribusi kategori lapangan usaha ini. Hal ini terjadi mengingat kedua faktor tersebut akan berimplikasi positif terhadap peningkatan kebutuhan masyarakat baik primer, sekunder dan tersier. Peningkatan kebutuhan ini akan mendorong laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan selanjutnya pertumbuhan ini akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan lapangan usaha akan tenaga kerja yang memadai.

Urutan keempat dimiliki oleh kategori lapangan usaha konstruksi dengan nilai kontribusi sebesar 10,17 %. Laju pertumbuhan lapangan usaha ini ditahun 2015 mencapai 4,53 %, sedangkan ditahun sebelumnya mencapai 3,84 %. Pertumbuhan lapangan usaha konstruksi dipengaruhi oleh tekanan pemenuhan kebutuhan masyarakat baik yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri maupun oleh pemerintah melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan daerah yang tentunya membutuhkan ketersediaan tenaga kerja yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu dengan sendirinya, lapangan usaha konstruksi akan selalu tumbuh seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, dan tentunya sebagian masyarakat akan selalu menggantungkan kehidupannya terhadap lapangan usaha ini.

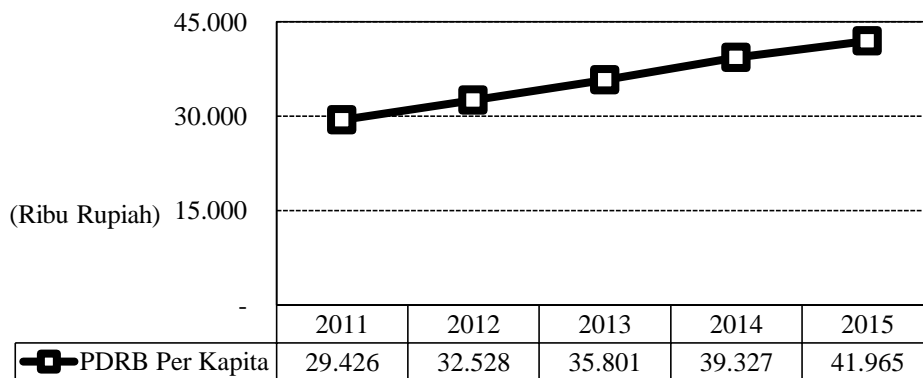
Kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian menduduki urutan kelima dengan kontribusi sebesar 8,95 %. Tingkat ketergantungan dan ketertarikan masyarakat terhadap aktivitas pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, meliputi 1) nilai jual hasil pertambangan dan penggalian; 2) ketersediaan lahan-lahan pertambangan dan penggalian; 3) masyarakat dapat secara langsung menikmati hasil pekerjaan mereka; 4) keterbatasan alternatif lapangan kerja dan tingkatan kompetensi sumberdaya manusia; dan 5) gambaran keberhasilan segelintir masyarakat yang bergerak dalam lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan lapangan usaha pertambangan dan penggalian sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan antara tahun 2015 dengan tahun 2014 dimana pada tahun 2015 mencapai 0,91 % sebelumnya hanya mencapai 1,57 %. Dalam pengelolaan lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengingat pengembangan lapangan usaha ini akan berbanding lurus dengan tingkat kerusakan lingkungan dan rentan terhadap degradasi kualitas lingkungan akibat tingkat pemahaman dan penerapan teknologi yang kurang memadai dari para pelaku tambang sehingga apapun bentuk kebijakan daerah harus lebih ditekankan kepada keberpihakkan terhadap kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, laju pertumbuhan lapangan usaha harus diikuti dengan peningkatan kualitas regulasi dan pengawasan oleh pemerintah daerah dengan dukungan masyarakat yang berorientasi kepada kelestarian lingkungan, keberlanjutan, keadilan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya urutan keenam sampai urutan keenam belas diduduki oleh kategori lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; transportasi dan pergudangan; real estat; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; jasa lainnya; jasa perusahaan; dan pengadaan listrik dan gas. Sedangkan kategori lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang merupakan kategori yang memiliki kontribusi terkecil atau urutan ketujuh belas dengan nilai 0,03 %. Kurang tertariknya masyarakat terhadap lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang lebih disebabkan karena masih rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat jika mengelola lapangan usaha tersebut sehingga daya serap tenaga kerja oleh lapangan usaha ini masih sangat terbatas.

4. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Produk domestik regional bruto per kapita merupakan hasil pembagian produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk. Besaran produk domestik regional bruto per kapita ini merupakan salah satu indikator makro yang dijadikan dasar bagi pengukuran tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di suatu daerah. Dapat dianalogikan bahwa semakin tinggi tingkat produk domestik regional bruto per kapita semakin tinggi tingkatan kesejahteraan masyarakat. Besaran produk domestik regional bruto per kapita Kabupaten Belitung tahun 2011-2015 digambarkan melalui grafik berikut :

Gambar 1.3
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Kabupaten Belitung
Tahun 2011-2015



Secara umum, produk domestik regional bruto per kapita mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tahun 2015, produk domestik regional bruto per kapita mencapai Rp 41.965.000 meningkat sebesar Rp 2.638.000 atau 6,71 % jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang bernilai Rp 39.327.000. Pada tahun 2015, kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan menduduki nilai tertinggi dengan nilai sebesar Rp 11.504.000, dan selanjutnya nilai terbawah berada pada kategori lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.

Peningkatan besaran produk domestik regional bruto per kapita yang terjadi setiap tahunnya merupakan indikasi makro yang menunjukkan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah. Agar peningkatan produk domestik regional bruto per kapita tersebut dapat berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maka peningkatan tersebut harus diikuti oleh pemerataan sebaran pendapatan di seluruh lapisan masyarakat sehingga pengelompokan konsentrasi pendapatan pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu dapat dihindari. Dukungan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah, stabilitas ekonomi, ketahanan dan kemampuan antisipasi perubahan faktor-faktor ekonomi diprediksikan akan mendorong laju pertumbuhan produk domestik regional bruto per kapita daerah.

5. Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang dipergunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu

menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi/deflasi diukur dari prosentase perubahan IHK. 1) Kenaikan harga bahan bakar minyak; 2) kenaikan gaji pegawai negeri sipil; 3) kenaikan tarif dasar listrik; 4) kenaikan nilai tukar dolar terhadap rupiah; dan 5) perubahan permintaan dan penawaran kebutuhan masyarakat adalah merupakan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi besaran inflasi yang terjadi. Gambaran ringkas tingkat inflasi Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) keadaan Desember 2016 ditunjukkan tabel berikut ini :

Tabel 1.9
IHK dan Tingkat Inflasi/Deflasi Kota Tanjungpandan Desember 2016, Tahun Kalender 2016, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012 = 100)

No	Kelompok Pengeluaran	IHK November 2016	IHK Desember 2016	Inflasi/Deflasi Desember 2016 ¹⁾	Laju Inflasi/Deflasi Tahun Kalender 2016 ²⁾	Inflasi/Deflasi Tahun ke Tahun ³⁾
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	UMUM (Headline)	133,03	134,23	0,90	4,92	4,92
1.	Bahan makanan	142,39	142,96	0,40	7,92	7,92
2.	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	136,66	136,61	- 0,04	10,25	10,25
3.	Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar	126,01	125,99	- 0,02	0,72	0,72
4.	Sandang	124,03	124,19	0,13	2,15	2,15
5.	Kesehatan	128,89	128,96	0,05	2,33	2,33
6.	Pendidikan, rekreasi, dan olahraga	137,60	137,59	- 0,01	3,31	3,31
7.	Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan	123,86	132,88	7,28	0,43	0,43

*Keterangan : 1) Prosentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya
2) Prosentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap IHK Desember 2015
3) Prosentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap IHK Desember 2015*

Sumber data : Berita Resmi Statistik, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 02/1/19/Th.IV Tanggal 3 Januari 2017, Tahun 2017

Mengacu tabel di atas bahwa inflasi Kota Tanjungpandan (Kabupaten Belitung) keadaan Bulan Desember 2016 sebesar 0,90 %. Berdasarkan kelompok pengeluaran, tingkat inflasi yang terjadi pada setiap kelompok sebagai berikut :

1. Bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,40 %. Subkelompok yang mengalami inflasi tertinggi adalah subkelompok daging dan hasil-hasilnya 2,33

%, dan terendah terjadi pada subkelompok kacang-kacangan 0,05 %, sedangkan subkelompok yang mengalami deflasi tertinggi adalah subkelompok bumbu-bumbuan 3,34 % dan terendah terjadi pada subkelompok buah-buahan 0,66 %;

2. Makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,04 %. Subkelompok mengalami deflasi yakni subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,41 %, sedangkan kelompok tembakau dan minuman beralkohol inflasi sebesar 0,80 %, sedangkan subkelompok makanan jadi relatif stabil;
3. Perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami deflasi sebesar 0,02 %. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok bahan bakar, penerangan dan air 0,26 %; dan subkelompok penyelenggaraan rumah tangga 0,14 %, sedangkan subkelompok biaya tempat tinggal mengalami deflasi sebesar 0,16 % , sedangkan subkelompok perlengkapan rumah tangga relatif stabil;
4. Sandang mengalami inflasi sebesar 0,13 %. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya 0,77 %, sedangkan subkelompok sandang laki-laki; subkelompok sandang wanita; dan subkelompok sandang anak-anak relatif stabil;
5. Kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,05 %. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok perawatan jasmani dan kosmetika 0,11 %, sedangkan subkelompok jasa kesehatan; subkelompok obat-obatan dan subkelompok jasa perawatan jasmani relatif stabil;
6. Pendidikan, rekreasi, dan olahraga mengalami deflasi sebesar 0,01 %. Subkelompok yang mengalami deflasi yaitu perlengkapan/peralatan pendidikan sebesar 0,05 %; dan subkelompok rekreasi 0,01 %. Sedangkan subkelompok pendidikan, subkelompok kursus-kursus/pelatihan, subkelompok olahraga relatif stabil;
7. Transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 7,28 %. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu subkelompok transpor sebesar 11,26 % dan subkelompok komunikasi dan pengiriman 0,32 %, sedangkan subkelompok sarana dan penunjang transpor, dan subkelompok jasa keuangan relatif stabil.

Berdasarkan data dan informasi di atas terlihat bahwa kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi kelompok yang memiliki angka inflasi tertinggi, dan angka inflasi terendah terjadi kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Jika dibandingkan dengan keadaan Desember 2014 maka terjadi penurunan tingkat inflasi sebesar 1,98 %, semula keadaan Desember 2014 sebesar 3,21 % menjadi 1,23 % pada keadaan Desember 2015. Pada keadaan Desember 2014, inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transpor, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 7,48 % dan pada kelompok pengeluaran sandang terjadi deflasi sebesar 0,17 %. Guna memonitoring, mengevaluasi dan mengendalikan perkembangan inflasi, daerah membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).